



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan No.12 Telp 8311729 Fax.8450704 SEMARANG
Website : <http://dinsos.jatengprov.go.id> E-mail:dinsosjateng@gmail.com

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2021.

Semarang,

2020

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

HARSO SUSILO, ST,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710509 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

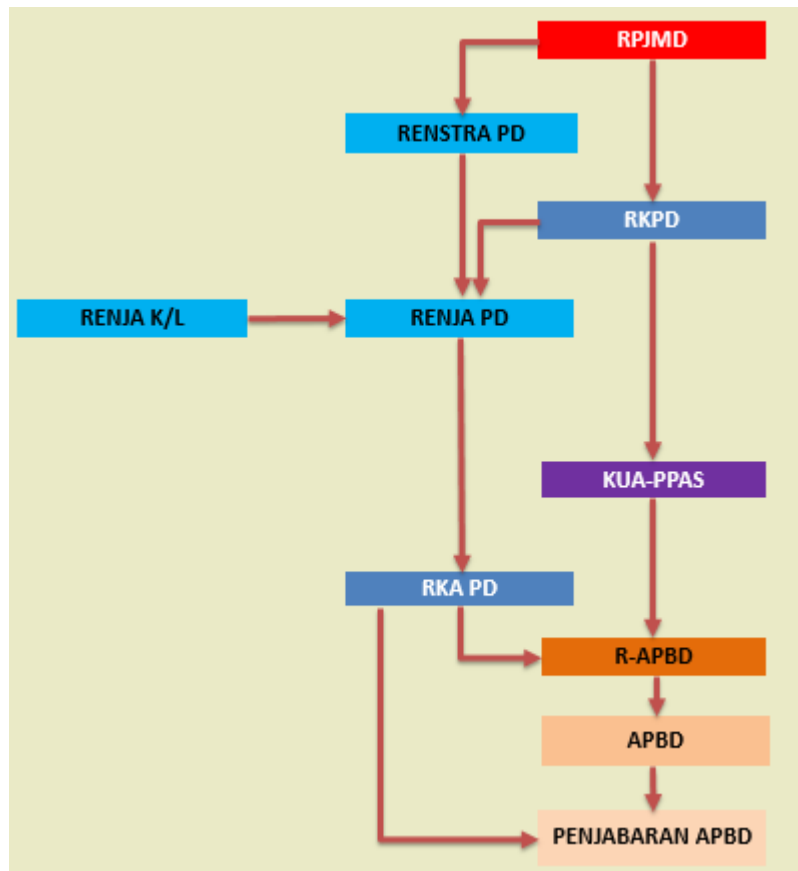
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai tupoksi. Secara fungsional Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.

Tahapan penyusunan Renja PD meliputi : persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan Rancangan Awal Renja PD, penyusunan Rancangan Renja PD, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD, perumusan Rancangan Akhir Renja PD, dan yang terakhir penetapan Renja PD.

Renja PD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2021, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renja Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021 hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, setelah Renja PD selesai ditetapkan (Tahap Perencanaan) selanjutnya dituangkan dalam RKA PD Tahun 2021 (Tahap Penganggaran).



Gambar I.1. Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- h) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- k) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- l) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 tanggal tanggal 15 Januari 2020 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2021.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran / pagu indikatif pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2021 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 pada tahun ke-3 periode Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- Menguraikan secara ringkas dan jelas terhadap latarbelakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
- Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan capaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023; Analisa kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Review terhadap rancangan RKPD Prov. Jateng Tahun 2021 dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Program dan Kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022.
- BAB V : PENUTUP
- Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2019 dan Capaian Renstra PD

Anggaran Dinas Sosial di Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp. 133.722.770.000,00 dengan rincian: Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp109.384.754.000,00 dan Belanja Langsung sejumlah Rp.24.338.016.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 4 program dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan keuangan Rp. 124.140.050.624 (97.19%).

A). Program Penanganan Fakir Miskin, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan Rp. 2.358.141.600,- (98.26 %) Keluaran yang dicapai antara lain :

- 1) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Pedesaan Tertangani dan Tervalidasi sebanyak 1.000 orang
- 2) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan Tertangani dan Tervalidasi sebanyak 1.000 orang.
- 3) 1 (satu) buah dokumen data kemiskinan dan PPKS tervalidasi.

B). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.205.000.000,00,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan Rp. 7.112.691.700,- (98.71 %) Keluaran yang dicapai yaitu :

- 1) Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS sebanyak 2.100 orang
- 2) Jumlah penyandang disabilitas terhabilitasi dalam LKS sebanyak 2.100 orang
- 3) Jumlah Tuna Sosial dan KPO terehabilitasi dalam LKS sebanyak 250 orang
- 4) Jumlah penerima manfaat terehabilitasi didalam Panti Pemerintah sebanyak 4.602 orang.

C). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.800.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% Dan keuangan Rp. 3.560.869.750,- (93.70 %). Keluaran yang dicapai antara lain :

- 1) Penanganan sosial terhadap korban bencana alam,
- 2) Penanganan sosial terhadap korban bencana sosial,
- 3) Jaminan Sosial Keluarga kepada PMKS Non Produktif melalui bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebanyak 12.764 orang.

D). Program Pemberdayaan Sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.900.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 % dan keuangan Rp. 6.818.516.674,- (98.81 %) Keluaran yang dicapai antara lain :

- 1) Jumlah PSKS yang mendapat penguatan sebanyak 2.073 orang;
- 2) Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial sebanyak 2.950 orang
- 3) Jumlah PSKS yang mendapatkan penguatan nilai Keperintisan, Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial

Hasil revidi dituangkan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial
s.d Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s.d Target Akhir Renstra 2018- 2023	Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti	4,10	4,45%	0,82	0,82	100%	4,10	1,64	1,64	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,15		0,03	0,04	100%	0,15	0,06	0,06	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,16		0,03	0,05	100%	0,16	0,06	0,06	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,18		0,04	0,05	100%	0,18	0,07	0,07	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,22		0,04	0,05	100%	0,22	0,09	0,09	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s.d Target Akhir Renstra 2018- 2023	Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,13		0,03	0,03	100%	0,13	0,05	0,05	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,13		0,03	0,03	100%	0,13	0,05	0,05	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,16		0,03	0,05	100%	0,16	0,06	0,06	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,11		0,02	0,03	100%	0,11	0,04	0,04	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,15		0,03	0,03	100%	0,15	0,06	0,06	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,21		0,04	0,04	100%	0,21	0,08	0,08	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s.d Target Akhir Renstra 2018- 2023	Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,23		0,05	0,07	100%	0,23	0,09	0,09	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,17		0,03	0,05	100%	0,17	0,07	0,07	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,14		0,03	0,06	100%	0,14	0,06	0,06	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,21		0,04	0,05	100%	0,21	0,08	0,08	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,09		0,02	0,03	100%	0,09	0,04	0,04	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,28		0,06	0,07	100%	0,28	0,11	0,11	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s.d Target Akhir Renstra 2018- 2023	Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,07		0,01	0,02	100%	0,07	0,03	0,03	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,18		0,04	0,07	100%	0,18	0,07	0,07	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,14		0,03	0,03	100%	0,14	0,06	0,06	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,22		0,04	0,06	100%	0,22	0,09	0,09	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s.d Target Akhir Renstra 2018- 2023	Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,16		0,03	0,04	100%	0,16	0,06	0,06	100%
1.06.15	Rehabilitasi Sosial	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,23		0,05	0,05	100%	0,23	0,09	0,09	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,07		0,01	0,02	100%	0,07	0,03	0,03	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,07		0,01	0,01	100%	0,07	0,03	0,03	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,08		0,02	0,02	100%	0,08	0,03	0,03	100%
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,12		0,02	0,03	100%	0,12	0,05	0,05	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s.d Target Akhir Renstra 2018- 2023	Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	0,11		0,02	0,03	100%	0,11	0,04	0,04	100%
1.06..16	Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi	0,29		0,06	0,06	100%	0,29	0,11	0,11	100%
1.06.17	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif	1,82		0,36	0,36	100%	1,82	0,73	0,73	100%
1.06.18	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS	34,38	47,05%	6,88	6,88	100%	34,38	13,75	11,99	67,87%

Ket:

- Periode 2013-2018 Populasi PMKS 4.965.855 jiwa yang telah tertanganis sebanyak 221.744 jiwa
- Periode 2013-2023 Populasi PSKS sesuai pemutahiran data tahun 2018 sebanyak 30.145, jumlah PSKS yang telah mendapatkan Penguatan sebanyak 20.764

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka kontribusi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian tujuan pembangunan tahun 2018-2023 adalah mendukung pencapaian pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah, yang dijabarkan kedalam 2 (dua) tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni :

1. Menurunkan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang dilaksanakan melalui:
 - a. Program Rehabilitasi Sosial guna penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar PMKS didalam panti.
 - b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial guna melaksanakan guna menyediakan kebutuhan dasar PMKS Non Produktif dan terlantar melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS).
 - c. Program Penanganan Fakir Miskin guna pengelolaan data Fakir Miskin dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Meningkatkan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial guna melaksanakan penguatan kapasitas agar mampu meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 yang merupakan bagian integral dari pencapaian Indikator pencapaian target sasaran program RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- a. Program rehalitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dan Panti Pelayanan Sosial diarahkan pada penyediaan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS dalam panti. Realisasi atas target RKPD tahun 2019 sebesar 100% atas target renstra sebesar 0,82%
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, realisasi atas target RKPD tahun 2019 sebesar 100% atas target renstra sebesar 0,36%
- c. Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin, realisasi atas target RKPD tahun 2019 sebesar 100% atas target renstra sebesar 0,06%

- d. Program Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial realisasi atas target RKPD sebesar 100% atas target Renstra sebesar 6,88%.

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada level program dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Sosial											
1	Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti			0,82	1,64	2,46	3,28	0,82	1,64	2,46	3,28	
2	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,06	0,09	0,12	0,03	0,06	0,09	0,12	
3	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,06	0,09	0,13	0,03	0,06	0,09	0,13	
4	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,04	0,07	0,11	0,14	0,04	0,07	0,11	0,14	
5	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,04	0,09	0,13	0,17	0,04	0,09	0,13	0,17	
6	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,05	0,08	0,1	0,03	0,05	0,08	0,1	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,05	0,08	0,11	0,03	0,05	0,08	0,11	
8	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,06	0,1	0,13	0,03	0,06	0,1	0,13	
9	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,02	0,04	0,06	0,08	0,02	0,04	0,06	0,08	
10	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,06	0,09	0,12	0,03	0,06	0,09	0,12	
11	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,04	0,08	0,12	0,17	0,04	0,08	0,12	0,17	
12	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,05	0,09	0,14	0,18	0,05	0,09	0,14	0,18	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,07	0,1	0,14	0,03	0,07	0,1	0,14	
14	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,06	0,08	0,11	0,03	0,06	0,08	0,11	
15	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,04	0,08	0,13	0,17	0,04	0,08	0,13	0,17	
16	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,02	0,04	0,06	0,07	0,02	0,04	0,06	0,07	
17	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,06	0,11	0,17	0,22	0,06	0,11	0,17	0,22	
18	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,01	0,03	0,04	0,06	0,01	0,03	0,04	0,06	
19	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,04	0,07	0,11	0,14	0,04	0,07	0,11	0,14	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,06	0,08	0,11	0,03	0,06	0,08	0,11	
21	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,04	0,09	0,13	0,18	0,04	0,09	0,13	0,18	
	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,03	0,06	0,09	0,13	0,03	0,06	0,09	0,13	
	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,05	0,09	0,14	0,18	0,05	0,09	0,14	0,18	
22	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,01	0,03	0,04	0,06	0,01	0,03	0,04	0,06	
23	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,01	0,03	0,04	0,06	0,01	0,03	0,04	0,06	
24	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,02	0,03	0,05	0,07	0,02	0,03	0,05	0,07	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,02	0,05	0,07	0,1	0,02	0,05	0,07	0,1	
	Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti			0,02	0,04	0,07	0,09	0,02	0,04	0,07	0,09	
	Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi			0,06	0,11	0,17	0,23	0,06	0,11	0,17	0,23	
	Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif			0,36	0,73	1,09	1,46	0,36	0,73	1,09	1,46	
	Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS			6,88	13,75	18,86	25,74	6,88	11,99	18,86	25,74	Penyesuaian target pasca refocusing Covid 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Belum optimalnya Pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor
2. Belum optimalnya validasi data & pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya
3. Masih kurang optimalnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Belum optimalnya persiapan sosial fakir miskin perkotaan dan perdesaan sebelum memperoleh layanan
3. Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :

a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :

- 1) Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) Belum optimalnya persiapan sosial fakir miskin perkotaan dan perdesaan sebelum memperoleh layanan
- 3) Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial
- 4) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

- b. Peluangdalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :
- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.
 - 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial dan SDM penyelenggara Pelayanan sosial.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut

Isu Strategis	Isu penting yang perlu ditindaklanjuti	Catatan
Tingginya Populasi PMKS	Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antarsektor	Pelayanan sosial dasar PMKS di dalam panti dimaksimalkan guna memenuhi standart pelayanan minimal
		Optimalisasi persiapan social fakir miskin perkotaandan perdesaan sebelum memperoleh layanan
		PMKS non produktif dan terlantar serta korban bencana masih membutuhkan perlindungan dan jaminan social guna memenuhi kebutuhan dasar
Belum Optimalnya Peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial
Masih terdapat inxlution error Belum dan exlusion error dalam Basis Data Terpadu (BDT)	Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya	Pelaksanaan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) ditingkat Kabupaten /Kota belum berjalan optimal

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 merupakan panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja mendasar pada kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana RKPD provinsi Jawa Tengah tahun 2021 maka rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diarahkan guna mendukung percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan dengan 2 kinerja utama yakni penurunan populasi PMKS dan Meningkatkan peran PSKS dalam UKS, yang selanjutnya dirumuskan dalam program :

1. Program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar PMKS terlantar yang diarahkan pada meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS terlantar didalam panti.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial , difokuskan pada penyelenggaraan jaminan sosial PMKS non produktif dan terlantar melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan penanganan korban bencana provinsi yang diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran PMKS non produktif dan terlantar serta penanganan psikososial korban bencana.
3. Program Penanganan Fakir Miskin, difokuskan pada pengelolaan data fakir miskin dan PMKS lainnya serta persiapan sosial keluarga fakir miskin yang diarahkan pada dukungan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan PMKS oleh Kabupaten/Kota serta bimbingan sosial keluarga fakir miskin.
4. Program Pemberdayaan Sosial, difokuskan pada penguatan kapasitas PSKS agar dapat meningkatkan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial yang diarahkan pada penguatan kapasitas PSKS agar mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwilayahnya.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial	Jawa Tengah	Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti		86,799,235	Rehabilitasi Sosial	Jawa Tengah	Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti		6,889,875	
2	Penanganan Fakir Miskin	Jawa Tengah	Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi		7,300,000	Penanganan Fakir Miskin	Jawa Tengah	Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi		2,500	
3	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jawa Tengah	Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif		5,083,000	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jawa Tengah	Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif		40,722,111	
4	Pemberdayaan Sosial	Jawa Tengah	Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS		13,110,674	Pemberdayaan Sosial	Jawa Tengah	Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS		6,485,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, isu strategis pembangunan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2021, pembangunan Jawa Tengah pada Tahun 2021 diarahkan pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Mendasar pada hal tersebut diatas selanjutnya Arah dan Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang terkait dengan Tusi Dinas Sosial

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
 - a. Penyediaan *basic needs access* melalui penyelenggaraan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terlantar didalam panti.
 - b. Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program “maju bareng untuk penaggulangan kemiskinan” melalui pengelolaan dan penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan melalui Peningkatan ketahanan daerah dalam penangulangan bencana, melalui penyelanggaran penanganan korban bencana provinsi meliputi penyediaan kebutuhan pangan (dapur umum) korban bencana dan pengerahan TAGANA ke lokasi bencana untuk recovery dan pemulihan sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah guna mendukung prioritas pembangunan Jawa Tengah dalam percepatan pengurangan kemiskinan, dengan agenda :

1. Penanganan Fakir Miskin, meliputi :
 - a. Verifikasi, validasi dan pemutakhiran Basis Data terpadu sebagai dasar penyusunan strategi penanganan fakir miskin dan PMKS lainnya.
 - b. Penanganan Kemiskinan berbasis kewilayahan dan kelompok.
2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial PMKS melalui Panti Pelayanan Sosial.
3. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam/ Sosial dan Jaminan Sosial bagi PMKS Non Produktif.
4. Pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya meningkatkan peran dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial :

1. Penanganan PMKS berbasis Kelompok (*Sosial Group Work*) dilaksanakan melalui Program Penanganan Fakir Miskin.
2. Penanganan PMKS berbasis Kelembagaan dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial.
3. Penanganan PMKS berbasis Individu dan Keluarga (*Sosial Case Work*) dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Peningkatan peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial.

Program Dan Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PMKS terlantar didalam panti dan diarahkan pada persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan keberfungsian sosial PMKS terlantar didalam panti.
2. Program Penanganan fakir Miskin difokuskan pada kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PMKS lainnya dan

diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.

3. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan persentase peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PMKS Non Produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan persentase penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PMKS Non Produktif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sub bab sebelumnya yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dimaksudkan guna memastikan bahwa agenda penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terealisasi melalui pembebanan tugas dan fungsi kepada struktur yang ada. Selain itu guna memastikan setiap struktur memiliki tugas dan fungsi sebagai bagian penjabaran Kinerja yang bersangkutan. Adapun tujuan dan Sasaran kinerja tahun 2021, yaitu:

1. Menurunkan populasi PMKS sebesar 1,76% Yang merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun 2019,2020 dan target tahun 2021.
2. Meningkatkan peran PSKS dalam UKS sebesar 26,90 % yang merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun 2019,2020 dan target tahun 2021.

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan Populasi PMKS		Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	1,76
		Menurunya populasi PMKS	Prosentase Penurunan Jumlah PMKS		
2	Meningkatkan peran PSKS dalam UKS		Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS	%	26,90
		Meningkatnya peran PSKS dalam UKS	Persentase PSKS yang mampu melaksanakan UKS		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi serta Musrenbangwil. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan tercantum pada tabel 4.1.

BAB V

PENUTUP

1. Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Kerja Kementerian Sosial 2021 serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2021. Di lain pihak, Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam Renja menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan pendanaan daerah;
2. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renja adalah :
 - a. Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan visi, misi dan program kerja prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 - b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renja PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;
 - c. Bappeda melakukan proses finalisasi RKPD Tahun 2021 melalui Forum Musrenbang;
 - d. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renja PD berdasarkan RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Pergub.
3. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

TABEL IV/1 (Lampiran Bab IV)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RENCANA LAMA	PROGRAM RENCANA PEMENDAGRI RI	KEGIATAN RENCANA LAMA	KEGIATAN PEMENDAGRI RI	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PAD	DOKUMEN	Total/lemb. Anggaran	Page/Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Unit Kerja)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Unit Kerja) Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target									
												Volume	Rp.	Rp. 548	Volume	Rp.								
Meningkatkan Kualitas Pemangkuang Keluarga (Kualitas Sosial PERS)								Perencanaan Perencanaan Sosial PERS			SL	1,07			1,9								Dinas Sosial	
	Disabilitas/Penderita Penyandang Masalah Sosial (PMS)							Perencanaan Perencanaan Sosial PERS	Disang		SL	1,07			19323								Dinas Sosial	
		1.06.01	1.06.02	Rehabilitasi Sosial	REHABILITASI SOSIAL			Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,17			1,18								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Bipartit Rata)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,17			1,17								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Wahana Utama)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,17			1,18								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,03			1,13								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,13			1,17								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,03			1,09								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,09			1,07								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,09			1,11								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,11			1,14								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,11			1,17								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,08			1,11								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	
								Perencanaan Rehabilitasi Sosial PERS dan PERS			SL	1,08			1,13								Dinas Sosial - Partisipasi Sosial Masyarakat (Konsorsium)	

[illegible]

TUJUAN	SALURAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RIYAD LAMA	PROGRAM RIYAD PEMENDAGRI IS	KEGIATAN KEMAS LAMA	KEGIATAN KEMENDAGRI IS	INDIKATOR TUJUAN, SALURAN, PROGRAM (Suburutan) KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022			DAK	PAD	BEMKAT	Total Jenis Anggaran	Page View/Bulan	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Urutan Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Urutan Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 1
												Target			Target										
												Volume	Rp-	Rp. RMB	Volume	Rp-	Rp. RMB								
												Volume	Rp-	Rp. RMB	Volume	Rp-	Rp. RMB								
									Belanja pembelian unit/lot barang, jasa dan bahan-bahan lainnya di PPK/DA penanggung jawab/Unit Kerja 12 bulan																
								Perbaikan Perbaikan Akutatisasi di Bulan Perak			100	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0					

TUJUAN	SALINAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RUMAH LAMA	PROGRAM RUMAH PERKENDARAAN	KEGIATAN KENSTRAS LAMA	KEGIATAN PERKENDARAAN IN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		DAM	PAD	BEMKAT	Total Jenis Anggaran	Page Ter (Bak)	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Utusan Jember/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Utusan Jember/Unit Kerja Eksternal 2 - Eksternal 1
												Target		Target									
												Volume	Rp.	Volume	Rp.								
												Rp. BAB	Rp.	Rp. BAB	Rp.								
									Penyediaan barang			100	75.220.000	75.220.000	100	250.000.000	0	0	0	0			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD KEMENDUKA BARU	KEGIATAN KEMENDUKA LAMA	KEGIATAN KEMENDUKA BARU	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Suburutan) KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022			DAM	PAD	JENJHKT	Total Unit Anggaran	Page/terbitan	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Urusan Jember/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Urusan Jember/Unit Kerja Tahun 2 - Tahun 3
												Target			Target										
												Volume	Rp.	Rp. RMB	Volume	Rp.	Rp. RMB								
									Pembelian Peralatan Pendidikan (P3K2)			100	0	0	100	40.000.000	0	0	0	0					
										Batas Belanja (Dikembangkan)															
										Batas Pemasukan/Pengeluaran/Penghasilan Pajak, Uang Hibah, Penempatan/Kelemb. Sosial															
										Batas Pemasukan/Pengeluaran/Penghasilan Pajak, Uang Hibah, Penempatan/Kelemb. Sosial															
										Batas Pengeluaran Disk. Diklat/Disdik															
										Batas Disk. Sederhana/Disdik. Seder.															
									Pembelian Peralatan Kesehatan (P3K2)			100	0	0	100	25.000.000	0	0	0	0					
										Batas Pengeluaran Disk. Diklat/Disdik															
									Pengadaan Asuransi yang Mudah Akses			100	0	0	100	30.000.000	0	0	0	0					
										Batas Pemasukan/Pengeluaran/Penghasilan Pajak															
									Pengadaan Pendidikan Kesehatan di Dalam Rump.			100	25.000.000	25.000.000	100	40.000.000	0	0	0	0					
										Batas Pengeluaran/Pembelian. Kesehatan/Kelembagaan															
										Kontribusi/Pembelian Kegiatan															
									Pengadaan Pendidikan			100	120.000.000	120.000.000	100	2.000.000.000	0	0	0	0					
										Batas Kebutuhan dan Kebutuhan Panti Sosial															
										Batas Pengeluaran Hibah/Gratifikasi															
									Pengadaan Hibah			100	60.000.000	60.000.000	100	100.000.000	0	0	0	0					
										Batas Pabean Pajak, Subsidi, Panti Sosial															
										Batas Pembelian Hibah/Gratifikasi dan Bantuan Pendidikan															
										Survei Lapangan Diklat dan P3K2 yang meliputi kebutuhan kesehatan	Diklat	100	2.000.000.000	2.000.000.000	100	2.000.000.000	0	0	0	0	120.000.000			120.000.000	
										Waktu Kegiatan Terbatas dan Kebutuhan Sosial		100	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
										BPFD dan Peralatan Pendidikan dan Kesehatan (P3K2) Pendidikan															
										BPFD dan Peralatan Pendidikan dan Kesehatan (P3K2) Kesehatan															
										Fasilitas Pendidikan Nonformal untuk Masyarakat yang Peningkatan Kualitas		100	100.000	100.000	100	100.000	0	0	0	0					

TUJUAN	SALINAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM KEMAS LAMA	PROGRAM KEMAS PEMENDAGRI IS	KEGIATAN KEMAS LAMA	KEGIATAN KEMENDAGRI IS	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022			DAM	PAD	BEMKAT	Total Jenis Anggaran	Page/row/Baris	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Urusan Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Urusan Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 1
												Target			Target										
												Volume	Rp.	Rp. 000	Volume	Rp.									
										Facilitas Pembentukan Nomor Induk Kependudukan (KIPM)															
									Pembinaan Berbasis Sistem Pengelolaan			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SAKURAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM SPESIFIK LAMA	PROGRAM SPESIFIK PERSEKUTUAN	KEGATAN KENSTRA LAMA	KEGATAN PERSEKUTUAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUK KEGIATAN	SUK SUB KEGIATAN	SATUAN	2024			2025		DAK	PAD	DB/CHT	Total Jarak Angkutan	Page One Effect	LSD/MSI	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target			Target									
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.								
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan			100	100.000.000	100.000.000	100	1.000.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					
								Subsidi Makanan dan Minuman																
								Penyediaan Makanan dan Minuman			100	1.000.000	1.00											

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RIYAD LAMA	PROGRAM RIYAD KEMENDAGRI RI	KEGIATAN KEMEND LAMA	KEGIATAN KEMENDAGRI RI	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Sub-urutan) KEGIATAN (Output)	SUB SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022			DAM	PAD	SHEKAT	Total/Total Anggaran	Page/terbilang	LOKASI	Perangkat Daerah Peninggihan Urutan Jember/Unit Kerja	Perangkat Daerah Peninggihan Urutan Jember/Unit Kerja Elemen 2 - Elemen 2
												Target			Target										
												Volume	Rp.	Rp. RMB	Volume	Rp.	Rp. RMB								
									Pembinaan Pelayanan Pemeliharaan Kelengkapan			100	2.500.000	2.500.000	100	22.200.000	0	0	0	0					
									Bantuan Pelayanan Urutan Sistem Sosial																
									Pembinaan Pelayanan Pemeliharaan Kelengkapan			100	2.500.000	2.500.000	100	2.000.000	0	0	0	0					
									Bantuan Pelayanan Urutan Sistem Sosial																
									Penyediaan Asuransi yang Murah dan Terjangkau			100	87.000.000	87.000.000	100	55.700.000	0	0	0	0					
									Bantuan Sosial / Penanggulangan Risiko Bencana / Bencana																
									Penyediaan Makanan			100	700.000.000	700.000.000	100	2.000.000.000	0	0	0	0					
									Bantuan Makanan dan Minuman Bagi Sosial																
									Bantuan Pakan																
									Bantuan Pengisian Makanan																
									Penyediaan Pemeliharaan Kelengkapan di Lokasi Kerja			100	5.000.000	5.000.000	100	10.700.000	0	0	0	0					
									Bantuan Makanan Obat-obatan																
									Pembinaan Kesehatan			100	80.000.000	80.000.000	100	207.000.000	0	0	0	0					
									Bantuan Pakan Pakan / Makanan Pakan Sosial																
									Bantuan Pemeliharaan Kelengkapan dan Makanan Pemeliharaan																
									Bantuan Asuransi kesehatan pemeliharaan sosial			7000	2.000.000.000	2.000.000.000	100	2.000.000.000	0	0	0	0					Pasok Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat
									Menyediakan Fasilitas Kesehatan dan Pemeliharaan Sosial			100	800.000.000	800.000.000	100	80.000.000	0	0	0	0					
									Bantuan Penyelenggaraan Pemeliharaan Sosial																
									Penyediaan Fasilitas Pemeliharaan Sosial																
									Pembinaan Kelengkapan PIA, Makanan, dan Fasilitas Sosial			100	0	0	100	50.000.000	0	0	0	0					
									Bantuan Pakan pengalihan/kegiatan Pemeliharaan Sosial																
									Bantuan Pakan Pengalihan/kegiatan Pemeliharaan Sosial																
									Bantuan Makanan dan Minuman Pemeliharaan Sosial																
									Bantuan Sosial Sosial Pemeliharaan Sosial																
									Penyediaan Asuransi yang Murah dan Terjangkau			100	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM KEMAS LAMA	PROGRAM KEMAS PEMENDAGRI IS	KEGIATAN KEMAS LAMA	KEGIATAN PEMENDAGRI IS	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022			DAM	PAD	BEMKAT	Total Jenis Anggaran	Page Over/Banci	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Urutan Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Urutan Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 1	
												Target			Target											
												Volume	Rp-	Rp. RMB	Volume	Rp-	Rp. RMB									
										Perangkat program pemantauan sebagai alat pemantau kualitas, untuk memonitor pemantauan identitas pemantau manfaat dan pelayanan (KEMAS PEMENDAGRI IS)																
										Pemantauan		100	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000				1					
										peralatan pemantauan data dan informasi pemantauan pemantauan (KEMAS PEMENDAGRI IS)																

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RYSDAD LAMA	PROGRAM RYSDAD PERKENDARAAN	KEGIATAN KENSTRA LAMA	KEGIATAN PERKENDARAAN IS	INDUSTRI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Subsistem), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2024			2025		DAK	PAD	BENCHEIT	Total Jmla Anggaran	Page View Website	LOKASI	Perangkat Elektronik Peningkatan Jemah/Unit Kerja	Perangkat Elektronik Peningkatan Unit Jemah/Unit Kerja Substansi 2 - Substansi 3
												Target			Target									
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.								
		0.00.01.004				Agenda Rapat Koordinasi dan Koordinasi Data dan Laporan Peningkat Jemah																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Penyelesaian Masalah, Rencana, Pengendalian Peningkat Jemah																		
		0.00.01.004				Agenda Kebutuhan, Gakung, Peningkat Jemah																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja, Berusaha Kerja, Kerja dan Rencana, Target Peningkat Jemah																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Kebutuhan, Gakung, Peningkat Jemah																		
		0.00.01.004				Agenda Pelaksanaan dan Koordinasi dan Koordinasi Peningkat Jemah																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		
		0.00.01.004				Agenda Perencanaan Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]